



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS MULYANA**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **687436**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.916.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/42 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 1.146 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/100 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , WARISAN Rp. 1.000.000.000
6. Tanah Seluas 117 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m2/55 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 305.000.000**

1. MOTOR, HONDA H1BO2N42LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



2. MOTOR, HONDA H1BO2N42LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA BR V BR-V 1,5 PRESTIGE CVT Tahun 2020,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOTOR, YAMAHA ALL NEWXSR 155 Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	18.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.891.887
F. HARTA LAINNYA	Rp.	3.000.000
Sub Total	Rp.	4.273.891.887
III. HUTANG	Rp.	85.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.188.891.887

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.